DINAMIKA POLITIK PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2003-2015

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora Pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas



Pembimbing II: Drs. Syafrizal, M.Hum.

JURUSAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Dinamika Politik Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2003-2015". Pokok permasalahan dalam kajian ini yaitu mengungkapkan pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Dengan melakukan pendekatan dan metode sejarah politik, maka kajian ini mengungkapkan tentang latar belakang munculnya dinamika politik tentang pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Konsep yang digunakan dalam kajian ini yaitu sejarah politik dengan melihat sisi dari sebuah dinamika yang terjadi di lapangan.

Peristiwa pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman mengambil dasar adanya keputusan pusat yang melahirkan UU otonomi daerah diakhir abad 20-an. Keputusan itu membuat daerah mengambil penafsiran sendiri dalam membangun daerahnya. Akibat dari penafsiran tersebut, maka muncullah daerah baru dengan sistem pemekaran yang mulai berkembang.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup empat tahapan yaitu, heuristik (pengumpulan sumber). Dalam pengumpulan sumber tersebut didapat beberapa buku, koran serta arsip pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Tahapan kedua adalah kritik, ini juga terbagi menjadi dua yaitu intern dan ekstern. Hal ini bertujuan untuk menyatakan klasifikasi sumber, gagasan para aktor mengambil keputusan. Tahapan ketiga yaitu penafsiran terhadap fakta sejarah yang terjadi di lapangan, maka dari metode tersebut dapat ditemukan bahwa politik di Kabupaten Padang Pariaman mempunyai dinamika yaitu setelah Pariaman menjadi kota otonom, maka ibukota kabupaten Padang Pariaman harus dipindahkan ke wilayah kabupaten, namun hal tersebut melalui perjuangan panjang dalam penetapan ibukota kabupaten yang baru. Pemindahan tersebut terjadi pada periode kepemimpinan Muslim Kasim dan Ali Mukhni, namun wacananya sudah terjadi pada tahun 2003. Tahap keempat yaitu penulisan dari hasil studi yang terdapat dari berbagai sumber bacaan dan studi lapangan, maka terjadi dinamika politik terkait pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

Kata kunci: Politik, Pemindahan, Ibukota Kabupaten.